

---

**MENAKAR LOCAL TAXING POWER DENGAN ANALISIS  
SUBNATIONAL TAX EFFORT: STUDI PADA  
KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA BARAT****Muhamad Andri Arif Pramanda<sup>a\*</sup>, Citra Sukmadilaga<sup>b</sup>, Ivan Yudianto<sup>c</sup>**<sup>a,b,c</sup>Universitas Padjadjaran, Indonesia<sup>\*</sup>[muhamad21070@mail.unpad.ac.id](mailto:muhamad21070@mail.unpad.ac.id)*Diterima: April 2023. Disetujui: Mei 2023. Dipublikasi: Mei 2023*

---

**ABSTRACT**

*Regional taxes are the major component in driving local governments toward financial independence, but the fact remains that the majority of local governments are still heavily dependent on transfers from the central government. This study aims to identify the factors that determine local tax revenue, as measured by tax effort, and to benchmark tax efforts into 5 clusters & 4 quadrants. This research was conducted on 27 Local Governments in West Java during the periods 2014-2021 & analyse using the panel data method. The results show that investment & labour force has a significant positive effect on tax effort, while inflation, agricultural share on GDRP, & Government spending on economics have a significant negative effect on tax effort. Per capita PDRB has no effect on tax effort. The benchmark results find that local governments in the Bodebek + Karawang cluster, have the highest tax effort index, due to their economy focused in the industrial sector, situated near economic centers, & receive high investment & labour force. In contrast, local governments in the East Priangan cluster, which are characterized by a dominant agricultural sector, have the lowest tax effort. The results also show that the majority of local governments have achieved high tax efforts, but there is still a significant disparity between the Bodebek + Karawang cluster and other regions. This provides an evaluation opportunity for stakeholders to continuously innovate increasing investment & economic growth to expand the tax potential and create an effective and efficient tax administration.*

**Keywords:** *Tax Effort, GDP per Capita, Inflation, Investment.***ABSTRAK**

Pajak Daerah menjadi komponen utama dalam mendorong Pemda untuk mandiri secara keuangan, tetapi faktanya mayoritas Pemda masih sangat bergantung terhadap transfer Pemerintah Pusat. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan faktor yang menjadi determinan penerimaan pajak daerah yang digambarkan melalui *tax effort* serta melakukan *benchmarking* data menjadi 5 kluster & 4 kuadran. Penelitian ini dilaksanakan pada 27 Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat selama jangka waktu 2014 – 2021 & menggunakan metode analisis data panel. Hasil penelitian ini menemukan bahwa Investasi & Tenaga kerja berpengaruh positif signifikan terhadap *tax effort*, sedangkan inflasi, kontribusi sektor pertanian dalam PDRB & belanja fungsi ekonomi berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax effort*, & PDRB per kapita tidak berpengaruh terhadap *tax effort*. Selanjutnya hasil data *tax effort* dilakukan pemeringkatan & *benchmarking* menjadi 5 kluster & 4 kuadran. Ditemukan bahwa

---

Pemda yang berada pada Kluster Bodebek + Karawang memiliki *tax effort* paling tinggi, karena karakteristik ekonomi yang dominan pada sektor industri pengolahan, serta dekat dengan episentrum ekonomi & memiliki investasi serta tenaga kerja yang tinggi, sedangkan Pemda yang berada di Kluster Priangan Timur dengan karakteristik ekonomi dominan pada sektor pertanian memiliki *tax effort* sebaliknya. Hasil *benchmarking* kuadran juga menunjukkan bahwa mayoritas Pemda di Jawa Barat sudah meraih *tax effort* yang tinggi, namun masih terdapat disparitas yang sangat tinggi antara daerah yang berada pada Kluster Bodebek + Karawang dengan lainnya. Tentunya hal ini menjadi bahan evaluasi untuk para *stakeholder* agar terus berinovasi dalam meningkatkan investasi & perekonomian untuk memperluas potensi pajak, serta menciptakan administrasi perpajakan yang efektif & efisien

**Kata Kunci:** Upaya Pajak, PDRB per Kapita, Inflasi, Investasi.

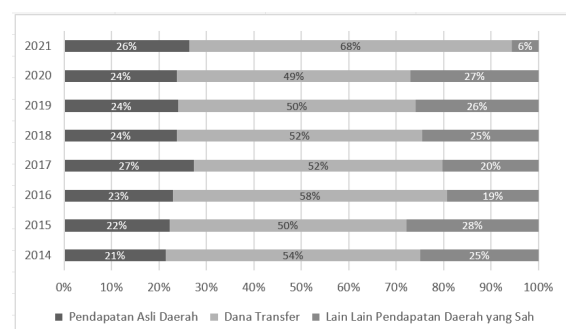
## PENDAHULUAN

Dengan semakin kuatnya pola pemerintahan terdesentralisasi, yang di Indonesia ditandai dengan terbitnya UU 32 Tahun 2004 yang diperbarui dengan UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, kian memberikan Pemerintahan pada level lebih rendah wewenang untuk mengatur & mengelola keuangannya sendiri. Kemampuan mengelola keuangan juga berarti wewenang untuk menetapkan & mengumpulkan pajak atau bea yang dikenakan pada penduduk atau kegiatan ekonomi yang berada di wilayah otonomi daerah tersebut (*local taxing power*).

Pengaturan pajak daerah tertulis dalam UU 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah & Retribusi Daerah yang telah diperbarui dengan UU 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat & Pemerintah Daerah, dimana dalam undang – undang ini mengatur 7 jenis pajak yang menjadi domain nya Pemerintah Provinsi & 8 jenis pajak yang menjadi domainnya Pemerintah Kabupaten/Kota, dalam UU ini memberikan pengaturan baru terkait pemerataan penerimaan pajak daerah melalui *opsen* pajak yang bersifat *piggy backing* antara pajak provinsi kepada kabupaten/kota.

Peraturan ini menjadi salahsatu terobosan baru mengingat masih besarnya ketergantungan Pemerintah Daerah kepada transfer Pemerintah Pusat (Bachtiar, 2022) Karenanya ketergantungan Pemda terhadap dana Pemerintah Pusat disebabkan masih

rendahnya kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah untuk membiayai belanja Pemda (Bachtiar, 2022), padahal secara prinsip Pemerintah Daerah diberikan wewenang dalam hal pengambilan keputusan tentang komposisi belanja & tingkat pendapatan, & Pemerintah Pusat hanya akan “menambah” pendapatan Pemerintah Daerah dengan memberikan dana perimbangan untuk menghindari *fiscal imbalances* atau ketimpangan keuangan antar pemerintah daerah.

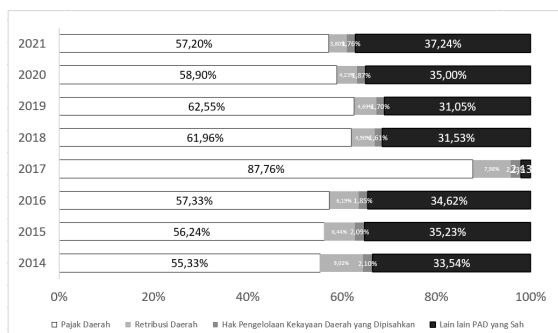


Sumber: DPJK 2023, data diolah penulis

Gambar 1. Komposisi Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat

Namun pada praktiknya, Selama rentang waktu 2014 – 2021, Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tidak lebih dari 27% total Pendapatan yang diterimanya, sedangkan dana perimbangan berkontribusi lebih dari 60% dalam rentang waktu yang sama, hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota di lingkungan Provinsi Jawa Barat secara

keseluruhan masih bergantung kepada dana transfer Pemerintah Pusat, bahkan sampai dengan tahun 2022, tercatat hanya terdapat 20 Pemerintah Daerah yang terdiri dari 14 Pemerintah Provinsi & 5 Pemerintah Kabupaten & 1 Pemerintah Kota.



Sumber: DPJK 2023, data diolah penulis

Gambar 2. Komposisi Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan data di atas, terlihat bahwa pajak daerah menjadi komponen yang paling signifikan dalam Pendapatan Asli Daerah Pemda di Provinsi Jawa Barat dengan kontribusi di atas 50%, maka optimalisasi pajak daerah harus menjadi fokus utama dalam upaya meningkatkan tingkat kemandirian keuangan daerah.

Salahsatu upaya dalam optimalisasi adalah melakukan evaluasi kinerja pajak sebagai kebijakan publik guna dapat untuk mengukur tingkat efisiensi, *output*, & dampak dari kebijakan tersebut. Kristiaji dkk., (2021) menyatakan bahwa terdapat beberapa indikator yang sering digunakan untuk mengukur kinerja penerimaan pajak, termasuk *tax ratio*, *tax gap*, & *tax effort*. Dalam penelitian ini, kami menggunakan indikator *tax effort* untuk mengevaluasi kinerja pajak pemerintah daerah yang didasari karena *tax effort* mempertimbangan beberapa faktor yang dianggap mempengaruhi jumlah penerimaan pajak seperti kapasitas otoritas pajak, kondisi ekonomi, & struktur demografi. Penelitian tentang *tax effort* pertama kali dilakukan oleh Bahl, (1971)

yang mengkaji proksi sebagai determinan penerimaan pajak, pembahasan tentang *tax effort* terus berkembang, Dalamagas (2019) berargumen bahwa 2 faktor utama yang bisa mempengaruhi penerimaan pajak adalah konsumsi masyarakat & faktor makroekonomi lainnya. Faktor makroekonomi yang mempengaruhi selanjutnya dikategorikan menjadi aspek sosial, ekonomis & politis yang menjadi faktor berpengaruh dalam peningkatan penerimaan pajak (Rodríguez, 2018)

Le dkk., (2012) mendefinisikan *tax effort* sebagai indeks rasio antara bagian dari pajak yang berhasil dipungut dari jumlah PDRB ataupun potensi pajak pada periode yang sama. Penelitian mengenai *tax effort* berfokus pada identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan pemerintah untuk memungut pajak, baik dari aspek ekonomi, sosial maupun politik (Bahl, 1971; Crivelli & Gupta, 2014; Rodríguez, 2018). Beberapa penelitian terdahulu mengenai *tax effort*:

Tabel 1. Tinjauan Literatur Mengenai *Tax Effort*

Peneliti	Sampel Penelitian	Periode Penelitian
Piancastelli (2001)	75 negara	1985 - 1995
Gupta (2007)	125 negara	1980 - 2005
Le, Dodson, & Bayraktar (2012)	110 negara	1994 - 2009
Cyan, Martinez-Vazquez, & Vulovic (2013)	94 negara	2002 - 2004
Fenochietto & Pesino (2013)	113 negara	1991 - 2012
Mawejje & Sebudde (2019)	150 negara	1996 - 2015
Marco & Gimenez (2019)	15 Pemda di Spanyol	2002 - 2012
Kristiaji, Vissaro & Ayumi (2021)	113 Pemda di Pulau Jawa	2015 - 2019

Bachtiar 504 Pemda di 2016 - 2018  
(2022) Indonesia

Sumber: data diolah penulis

Dalam mengukur *tax effort*, berbagai penelitian terdahulu menggunakan metode rasio pendapatan pajak terhadap PDB/PDRB, yang menggambarkan rupiah pajak yang berhasil diterima dari perekonomian yang bergulir. Metode dianggap sebagai proksi yang baik untuk mengukur *tax effort* (Mahdavi, 2008; Rodríguez, 2018; Mawejje & Sebudde, 2019; Kristiaji dkk., 2021)

Penggunaan analisis *tax effort* dapat memberikan informasi mengenai posisi fiskal di suatu daerah, yang diukur dengan nilai yang berkisar antara 0 hingga 1. Semakin mendekati nilai 1, maka posisi fiskal di daerah tersebut dapat dianggap kuat. Sebaliknya, semakin mendekati nilai 0, maka posisi fiskal di daerah tersebut dapat dianggap lemah (Kristiaji dkk., 2021). Dengan kata lain, semakin tinggi nilai *tax effort*, semakin besar kemampuan daerah dalam memperoleh pendapatan dari sektor perpajakan. Penggunaan *tax effort* sebagai tolok ukur keberhasilan pemungutan pajak memungkinkan pemerinkatan pemerintahan ke dalam empat kelompok atau kuadran berbeda: *low tax revenue-low tax effort*; *high tax revenue-low tax effort*; *low tax revenue-high tax effort*; & *high tax revenue-high tax effort* (Kristiaji dkk., 2021)

Aspek ekonomis pertama yang diteliti adalah besaran PDRB per kapita yang diperoleh oleh masyarakat di daerah tersebut, Dampak positif dari pertumbuhan ekonomi yang tinggi adalah meningkatnya kecenderungan masyarakat untuk membayar pajak, & kemampuan pemerintah dalam memungut pajak juga semakin meningkat (Le dkk., 2012) karena pendapatan per kapitanya sudah melewati batas tertentu untuk membiayai kebutuhan primernya (Rodríguez, 2018), Artinya, semakin tinggi pertumbuhan PDRB per kapita suatu daerah, maka akan meningkatkan kecenderungan masyarakat

untuk membayar pajak. Sejalan dengan Mawejje & Sebudde (2019) mengutip Mardiasmo yang menyatakan bahwa pertumbuhan PDRB dapat berdampak positif terhadap peningkatan penerimaan daerah. Hal ini dikarenakan semakin tinggi pendapatan individu, maka semakin besar pula kemampuan individu tersebut dalam membayar berbagai jenis pungutan, termasuk pajak yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Penelitian terdahulu menunjukkan PDB per kapita berpengaruh terhadap *tax effort* (Bahl, 1971; Gupta, 2007; Le dkk., 2012; Dalamagas dkk., 2019; Mawejje & Sebudde, 2019; Zárates-Marco. & Vallés-Giménez, 2019; Kristiaji dkk., 2021)

Aspek ekonomi lain yang dampaknya terhadap *tax effort* adalah inflasi. Inflasi merupakan konsekuensi dari pertumbuhan ekonomi yang menyebabkan harga-harga cenderung naik secara umum & terus menerus. Mahdavi, (2008) mengemukakan bahwa inflasi memiliki dampak tidak hanya terhadap kenaikan harga, melainkan juga terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Inflasi dapat mengurangi kemampuan masyarakat untuk berkonsumsi & juga dapat mengurangi penerimaan pajak daerah. Dengan kata lain, terjadinya inflasi dapat berdampak negatif terhadap kemampuan masyarakat dalam membayar pajak & pada akhirnya mempengaruhi perekonomian daerah. Mengingat pajak sektor konsumsi seperti pajak hotel, restoran & hiburan menjadi salah satu kontributor dalam pajak daerah. Peneliti menggunakan variabel inflasi untuk menggambarkan aspek sosioekonomis dalam penelitian ini, Sesuai dengan temuan & desain penelitian yang dilakukan oleh (Fenochietto & Pessino, 2013; Rodríguez, 2018; Mawejje & Sebudde, 2019) yang menunjukkan bahwa inflasi berpengaruh negatif terhadap *tax effort*, yang artinya semakin tinggi inflasi pada suatu daerah maka akan berdampak

kepada semakin rendah pula penerimaan perpajakan di daerah tersebut.

Aspek ekonomi lain yang dampaknya terhadap upaya perpajakan adalah investasi yang masuk atau diterima oleh Pemerintah Daerah, yang dalam beberapa literatur digambarkan menggunakan *Foreign Direct Investment* (FDI). Terdapat kemungkinan dampak positif & negatif dari investasi terhadap *tax effort*, investasi dapat meningkatkan *tax effort* jika menyebabkan peningkatan jumlah wajib pajak, penyebaran teknologi tinggi & pengetahuan, peningkatan persaingan, efek penarikan modal, peningkatan lapangan kerja, & tenaga kerja yang lebih terampil (Dalamagas dkk., 2019). Di samping itu, ketika arus investasi memengaruhi pertumbuhan ekonomi secara positif, hal ini meningkatkan total permintaan dalam perekonomian & berkontribusi pada pengumpulan lebih banyak pajak (Mahmood & Chaudhary, 2013). Dalam penelitian ini, investasi digambarkan menggunakan Penyertaan Modal Dalam Negeri (PMDN) & Penyertaan Modal Asing (PMA) yang diterima daerah yang menjadi unit analisis. Penelitian terdahulu menunjukkan pengaruh investasi terhadap *tax effort* (Mahmood & Chaudhary, 2013; Dalamagas dkk., 2019; Topal, 2021)

Mayoritas Pemda merupakan pemerintahan berbentuk kabupaten yang bersifat agraris memiliki struktur perekonomian yang di dominasi oleh sektor pertanian. Beberapa Pemda seperti Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Cianjur & 8 Pemda lainnya memiliki kontribusi sektor pertanian lebih dari 20% dari total PDRB & menjadi komponen yang paling signifikan. Namun pengenaan pajak pada sektor pertanian lebih sulit dibandingkan dengan perdagangan ataupun industri lainnya (Rodríguez, 2018). Penelitian sebelumnya telah menemukan hubungan negatif antara kontribusi dari sektor pertanian dalam PDRB & *tax effort*

(Gupta, 2007; Le dkk., 2012; Dalamagas dkk., 2019; Mawejje & Sebudde, 2019)

Aspek lain yang mempengaruhi kemampuan Perpajakan adalah aspek demografi (Rodríguez, 2018). Aspek demografi banyak digambarkan melalui variabel urbanisasi, kepadatan penduduk, pertumbuhan penduduk daerah perdesaan, ataupun total penduduk secara keseluruhan. Dalam penelitian ini menggunakan jumlah tenaga kerja (penduduk yang bekerja) untuk menggambarkan aspek demografis, dalam literatur terdahulu koefisien positif terhadap realisasi penerimaan pajak, karena semakin besar tenaga kerja di suatu daerah, akan meningkatkan basis pajak & aktivitas ekonomi yang pada gilirannya dapat meningkatkan realisasi penerimaan pajak (Kristiaji dkk., 2021)

Namun tentunya aspek demografis ini harus melihat pula struktur perekonomian dari Pemda tersebut (Ebel & Taliencio, 2005) Pajak yang berasal dari properti seperti Pajak Bumi & Bangunan akan menjadi sumber pendapatan pajak yang utama bagi daerah dengan struktur ekonomi yang berbasis non-jasa atau non perkotaan, sedangkan pajak konsumsi seperti restoran, hotel, & hiburan akan menjadi sumber pendapatan utama bagi daerah dengan struktur ekonomi berbasis jasa. Aspek demografis banyak diteliti dalam literatur sebelumnya seperti populasi perdesaan (Mawejje & Sebudde, 2019), populasi perkotaan (Rodríguez, 2018), pertumbuhan populasi (Bird dkk., 2008) & tenaga kerja (Mahdavi, 2008) berpengaruh terhadap upaya perpajakan daerah tersebut.

Aspek politis sebagai pendorong pemekaran wilayah juga diteliti dalam penelitian ini, aspek politis ini menggambarkan bagaimana para pemangku kebijakan pada Pemda menentukan arah pembangunannya (Rodríguez, 2018). Aspek politis banyak digambarkan dengan variabel – variabel institusional seperti kualitas pemerintahan, kualitas tata kelola, atau variabel lainnya.

Tetapi kami berargumen bahwa aspek politis bisa digambarkan melalui bagaimana *political will* Pemda dalam meningkatkan tingkat perekonomian warganya, & *political will* tersebut tergambarkan melalui alokasi APBD atau belanja pemerintah yang disahkan Bersama legislatif.

Variabel belanja pemerintah yang terinci belum banyak di teliti dalam literatur terdahulu mengenai *tax effort*. Kami hanya menemukan penelitian yang dilakukan oleh Mawejje & Sebudde, (2019) yang menggunakan variabel belanja pemerintah fungsi pendidikan & Fenochietto & Pessino (2013) yang menggunakan variabel belanja Kesehatan sebagai proksi determinan *tax effort*, kedua variabel tersebut pun memiliki kecenderungan sebagai aspek demografis yang menggambarkan tingkat Pendidikan & Kesehatan suatu daerah, berbeda dengan belanja fungsi ekonomi yang peruntukannya langsung untuk peningkatan ekonomi di daerah. Hal ini menjadi *theoretical gap* yang kami coba tekankan dalam penelitian ini agar dapat menambah khasanah pengetahuan berkenaan dengan variabel yang bisa menjadi proksi *tax effort*, karena selain menggambarkan *political will*, variabel belanja fungsi ekonomi juga menggambarkan kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang dijalankan oleh Pemda. Terlebih jika dilihat dari praktiknya, realisasi, alokasi belanja fungsi ekonomi ini hanya berkontribusi rata – rata sebesar 4 – 9% dari total APBD Pemda yang menjadi unit analisis. Variabel belanja fungsi ekonomi ini menjadi proksi baru dalam penelitian mengenai *tax effort* yang merupakan pengembangan dari variabel belanja pemerintah pada penelitian terdahulu

## METODE PENELITIAN

Analisis pada penelitian ini menggunakan data panel pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat dengan jangka waktu dari tahun 2014

sampai dengan tahun 2021. Secara total terdapat 27 Pemerintah Daerah & menghasilkan 160 observasi.

Tabel 2. Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Menjadi Unit Analisis

No	Kabupaten/ Kota	No	Kabupaten/Kota
1	Kab. Bandung	15	Kab. Subang
2	Kab. Bandung Barat	16	Kab. Sukabumi
3	Kab. Bekasi	17	Kab. Sumedang
4	Kab. Bogor	18	Kab. Tasikmalaya
5	Kab. Ciamis	19	Kota Bandung
6	Kab. Cianjur	20	Kota Banjar
7	Kab. Cirebon	21	Kota Bekasi
8	Kab. Garut	22	Kota Bogor
9	Kab. Indramayu	23	Kota Cimahi
10	Kab. Karawang	24	Kota Cirebon
11	Kab. Kuningan	25	Kota Depok
12	Kab. Majalengka	26	Kota Sukabumi
13	Kab. Pangandaran	27	Kota Tasikmalaya
14	Kab. Purwakarta		

Sumber: Ditjen Otda, Kemendagri

Data pajak daerah & belanja daerah didapatkan dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang dikompilasi oleh Dirjen Perimbangan Keuangan (DJPK), data inflasi, serta populasi tenaga kerja didapatkan dari Badan Pusat Statistik (BPS) masing – masing kabupaten/kota. Sedangkan data *tax effort* di ukur menggunakan pendekatan *standard regression*. Kristiaji dkk., (2021) menyebutkan *standard regression* yaitu Indeks *tax effort* diukur sebagai rasio antara penerimaan pajak aktual terhadap total GDP/PDRB.

Variabel independen dalam penelitian ini menggunakan pendekatan 3 aspek yang berpengaruh terhadap *tax effort*, yaitu aspek sosioekonomis, demografis & demografis (Rodríguez, 2018). Aspek sosioekonomis digambarkan dengan PDRB per kapita, kontribusi sektor pertanian dalam PDRB,



serta inflasi, aspek demografis digambarkan melalui variabel populasi, & aspek politis digambarkan melalui belanja pemerintah fungsi perekonomian.

Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini merupakan analisis data panel. Data panel adalah kombinasi dari data runtut waktu (*time series*) & data silang (*cross section*) (Prawoto, 2017) untuk mengetahui pengaruh dari masing – masing variabel. Sebelum dilakukan analisis data panel, kami melakukan uji pemilihan model untuk menentukan model terbaik dalam menganalisis data. uji pemilihan model menggunakan uji *chow*, uji *hausman*, & uji *Lagrange Multiplier*. uji *chow* digunakan untuk menentukan apakah akan menggunakan *Common Effect Model* atau *Fixed Effect Model*. Uji *hausman* digunakan untuk menentukan apakah akan menggunakan *Fixed Effect Model* atau *Random Effect Model*. Sementara itu, uji *lagrange multiplier* digunakan untuk menentukan apakah akan menggunakan *Random Effect Model* atau *Common Effect Model*. Setelah itu kami juga melakukan uji asumsi klasik berupa uji multikolinearitas untuk menguji apakah terdapat korelasi yang tinggi & sempurna antara variabel independent & dependen, sebelum dilaksanakan uji data panel. Adapun persamaan ekonometrika dengan metode data panel & rangkuman statistik pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$LnTAXEFit = \beta_0 + \beta_1LnPDRBKit + \beta_2INFit + \beta_3LnINVit + \beta_4LnAGRit + \beta_5LnNAKERit + \beta_6BFEKit + \epsilon it$$

dimana:

- $\beta_0$  : Koefisien konstanta
- TAXEFit : *Tax Effort* (persen)
- PDRBKit : PDRB per kapita (juta)
- INFit : Inflasi (persen)
- INVit : PMDA & PMDN (juta)
- AGRit : Kontribusi Sektor Pertanian dalam PDRB (juta)
- NAKERit : Tenaga Kerja (ribu)

- BFEKit : Belanja fungsi ekonomi (persen)
- $\epsilon$  : *error term*
- i* : individu (kabupaten/kota)
- t* : waktu (tahun)

Tabel 3. Rangkuman Statistik

Variabel	Obs	Mean	Std.Dev	Min	Max
<i>Tax Effort</i>	216	17,30	0,58	16,38	1,95
PDRB per kapita	216	1,15	0,50	0,20	31,62
Inflasi	216	26,81	2,71	18,43	32,81
Investasi	216	28,60	1,68	24,69	14,77
Kontribusi Sektor Pertanian dalam PDRB	216	13,31	0,80	11,26	-1,61
Tenaga Kerja	216	-2,88	0,44	-4,51	-4,01
Belanja Fungsi Ekonomi	216	-5,38	0,63	-8,88	0,00

Sumber: data diolah penulis

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Indeks *Tax Effort*

Berdasarkan analisis pemilihan model regresi menggunakan uji *chow* & uji *hausman*, model regresi yang kemudian digunakan ialah analisis data panel dengan *Fixed Effect Model*. Model juga sudah melewati uji multikolinieritas & tidak menunjukkan keberadaan keduanya di dalam model.

Tabel 4. Koefisien Korelasi Antar Variabel

	TAXEFPDRBK	INF	INV	AGR	NAKER	BFE
TAXEF	0.178	0.083	0.351	-0.524	0.118	0.179
PDRBK		-0.142	0.523	-0.280	0.162	0.133
INF			0.014	-0.117	0.015	-0.082
INV				0.167	0.633	0.100
AGR					0.565	-0.142
NAKER						0.035
BFE						

Sumber: data diolah penulis



Tabel 5. Hasil Regresi Data Panel Model Fixed Effect

Variabel	Coef	St.err	t-value	Sig
PDRB per kapita	-0,074	0,193	-0,383	0,702
Inflasi	-0,164	0,028	-5,750	0,000
Investasi	0,022	0,008	2,815	0,005
Kontribusi Sektor pertanian dalam PDRB	-0,663	0,192	-3,447	0,000
Tenaga Kerja	0,775	0,181	4,280	0,000
Belanja Fungsi Ekonomi	-0,129	0,025	-5,029	0,000

Sumber: data di olah penulis

Berdasarkan hasil regresi, menunjukkan bahwa seluruh variabel independen kecuali PDRB per kapita memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *tax effort* pada 27 Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat yang menjadi unit analisis. Hal ini sesuai dengan (Mahdavi, 2008; Postali, 2015; Topal, 2021) yang menemukan bahwa PDRB per kapita tidak berpengaruh terhadap *tax effort*, peningkatan PDRB per kapita menggambarkan peningkatan kemampuan ekonomi dari masing – masing warganya, peningkatan kemampuan ekonomi tersebut seharusnya berbanding lurus dengan jumlah pajak yang berhasil dipungut, tetapi hasil negatif ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah gagal untuk meningkatkan jumlah penerimaan pajaknya, tentunya banyak faktor lain yang harus di dalam baik oleh Pemerintah Daerah ataupun akademisi dalam hal ini, baik itu berkaitan dengan teori kepatuhan wajib pajak ataupun manajemen & reformasi administrasi Perpajakan yang bisa saja mempengaruhi peningkatan penerimaan pajak. Karena jika dilihat secara sederhana, peningkatan PDRB per kapita berarti peningkatan pendapatan atau kemampuan ekonomi warganya, & pastinya meningkatkan kewajiban pajak daripada seseorang tersebut, belum lagi dengan tingkat konsumsi yang juga memiliki kecenderungan meningkat. Hasil ini

bertolak belakang dengan (Gupta, 2007; Le dkk., 2012; Mawejje & Sebudde, 2019; Kristiaji dkk., 2021; dll) yang menemukan bahwa PDRB per kapita berpengaruh positif terhadap *tax effort*. Kami berargumen bahwa unit analisis pada penelitian yang bertolak belakang memiliki tingkat kepatuhan pajak yang lebih tinggi ataupun administrasi perpajakan yang lebih efektif.

Variabel sosioekonomis lain yaitu inflasi kontribusi sektor pertanian dalam PDRB berpengaruh negatif & signifikan terhadap *tax effort*. Variabel inflasi yang berpengaruh negatif terhadap *tax effort*, hal ini sesuai dengan hipotesis awal karena semakin tingginya harga bahan pokok, akan membuat kecenderungan konsumsi masyarakat menurun & sebisa mungkin melindungi kekayaan yang dimiliki (Mahdavi, 2008) yang pada akhirnya menurunkan penerimaan pajak daerah, karena komposisi pajak daerah yang bersifat konsumsi seperti pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan. Temuan ini sejalan dengan (Mahdavi, 2008; Fenochetto & Pessino 2013; Rodríguez, 2018; Mawejje & Sebudde, 2019; Topal, 2021) yang menjadi validasi bahwa dengan meningkatnya harga bahan pokok, akan mengurangi tingkat penerimaan pajak suatu negara, selain dituntut untuk meningkatkan penerimaan pajak. Pemerintah juga dituntut untuk menstabilkan harga bahan pokok, karena hal tersebut berkaitan dengan penerimaan pajak yang akan diterima.

Variabel kontribusi sektor pertanian dalam PDRB berpengaruh negatif terhadap *tax effort* sejalan dengan (Gupta, 2007; Le dkk., 2012; Rodríguez, 2018; Dalamagas dkk., 2019; Mawejje & Sebudde, 2019) Situasi ini berasal dari beberapa faktor tertentu seperti tenaga kerja yang di upah seadanya & bersifat musiman (Gupta, 2007), ukuran perusahaan pertanian yang kecil, hingga anomali bahwa ketika bagian dari sektor pertanian dalam PDRB meningkat, kebutuhan untuk total belanja



publik & penerimaan pajak (Topal, 2021). Hasil penelitian ini berbanding terbalik dengan (Postali, 2015) yang menemukan bahwa kontribusi sektor pertanian berpengaruh positif terhadap *tax effort*, hal ini terjadi karena basis pajak pemerintah yang menjadi unit analisis lebih kecil & karakteristiknya sangat didominasi sektor pertanian membuat indeks *tax effort* yang lebih efisien, walaupun tidak menampik Pemda tersebut memiliki ketergantungan yang lebih besar terhadap dana transfer dibandingkan dengan Pemda yang tidak didominasi oleh sektor pertanian.

Berbanding terbalik dengan ketiga variabel di atas, variabel investasi yang dalam hasil regresi berpengaruh positif signifikan terhadap *tax effort*, hasil ini sejalan dengan (Mahmood & Chaudhary, 2013; Dalamagas dkk., 2019; Topal, 2021). Fokus pemerintah daerah untuk menciptakan lingkungan bisnis membuat semakin besar investasi yang masuk ke daerah baik dalam bentuk PMA ataupun PMDN. Ketika investasi masuk baik dalam bentuk proyek pekerjaan atau operasi bisnis, hal tersebut akan menggulirkan dampak *multiplier* dalam peningkatan aktivitas ekonomi seperti penyerapan tenaga kerja, bertambahnya jumlah hunian dan UMKM, sampai meningkatkan nilai ekonomis tanah. *Multiplier Effect* tersebut menggerakkan roda perekonomian yang tentunya akan meningkatkan realisasi penerimaan pajak daerah itu sendiri (Kristiaji dkk., 2021). Tetapi hasil penelitian ini berbanding terbalik dengan temuan (Xing & Zhang, 2018) yang menemukan investasi tidak berpengaruh terhadap *tax effort* dikarenakan penelitian dilakukan pada negara yang menganut sistem uniter (otoriter), sehingga investasi tidak berpengaruh.

Variabel tenaga kerja yang menggambarkan aspek demografis terbukti berpengaruh positif & signifikan terhadap *tax effort* dalam penelitian ini. Hal ini sejalan dengan temuan (Mahdavi, 2008)

Dalam teori siklus hidup, seseorang yang mencapai umur pension akan merubah pola konsumsi & menabung (Mahdavi, 2008) yang artinya akan semakin sedikit berdampak kepada perguliran ekonomi, begitu pula dengan penduduk dibawah usia produktif. Populasi penduduk produktif yang dikategorikan tenaga kerja merupakan salahsatu faktor penggerak roda perekonomian, karenanya mereka menjadi bagian demografis yang melakukan aktivitas ekonomi yang dominan. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa semakin besar tenaga kerja suatu daerah, akan meningkatkan basis pajak daerah tersebut & pada akhirnya meningkatkan penerimaan pajak di daerah tersebut.

Variabel lain adalah belanja fungsi ekonomi yang menggambarkan *political will* pemerintah dalam memajukan perekonomian daerahnya. Dalam hasil regresi menunjukkan pengaruh negatif signifikan, hasil ini tidak sejalan dengan (Maweje & Sebudde, 2019; Fenochietto & Pessino, 2013). Dimana Fenochietto & Pessino, (2013) menemukan bahwa belanja fungsi pendidikan memiliki pengaruh positif terhadap *tax ratio*, pun negara - negara dengan belanja Pendidikan yang tinggi memiliki tingkat *tax ratio* yang tinggi pula, sejalan pula dengan temuan Maweje & Sebudde, (2019) menemukan bahwa belanja fungsi kesehatan berpengaruh positif & signifikan terhadap *tax effort*, & menemukan korelasi bahwa pemerintah dengan *tax effort* yang cukup tinggi memiliki kecenderungan untuk memiliki tingkat belanja kesehatan yang tinggi pula. Belanja fungsi ekonomi yang peruntukannya untuk meningkatkan perekonomian secara langsung dalam penelitian ini berpengaruh negatif terhadap *tax effort*, kami berargumen bahwa terdapat banyak faktor lain yang mendistorsi hubungan positif antara belanja fungsi ekonomi dengan *tax effort* seperti alokasi belanja yang tidak tepat sasaran, atau belanja yang

dianggarkan kurang bisa mencapai indikator kinerja/capaian.

Hasil ini perlu untuk dilakukan pengkajian lebih lanjut karena variabel belanja pemerintah belum banyak diteliti dalam literatur lain, terutama untuk pos – pos belanja sesuai dengan fungsi masing – masing, apakah berfokus kepada pendidikan, kesehatan, ekonomi, atau jenis belanja pemerintah lain seperti pelayanan, keamanan dll.

Tabel 6. Hasil Pengujian *R-square*

Root MSE	0.126879	R-squared	0.959133
Mean dependent var	-5.380465	Adjusted R-squared	0.951987
S.D. dependent var	0.629086	S.E. of regression	0.137845
Akaike info criterion	-0.985617	Sum squared residual	3.477205
Schwarz criterion	-0.469950	Log-likelihood	139.4466
Hannan-Quinn criter.	-0.777286	F-statistic	134.2173
Durbin-Wstat	1.352813	Prob(F-statistic)	0.000000

Sumber: data diolah penulis

Berdasarkan hasil regresi, didapatkan koefisien determinasi (*R-square*) sebesar 0,959133. Artinya variabel *tax effort* dipengaruhi 95% oleh variabel independent yang diteliti dalam penelitian ini, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti pada penelitian ini. Dari hasil regresi juga didapatkan koefisien korelasi (*r*) sebesar 0,97 yang berarti antara variabel independent & dependen dalam penelitian ini memiliki hubungan yang sangat kuat. *F-statistic* juga berada di angka <0,05 yang berarti keseluruhan variabel independent yang diteliti secara simultan berpengaruh terhadap variabel *tax effort*

#### Tren & Benchmarking *Tax Effort*

Setelah menguji determinan dari variabel independen, peneliti juga melakukan pemeringkatan atas indeks *tax*

*effort* dari masing – masing Pemerintah Kabupaten/Kota yang menjadi unit analisis.

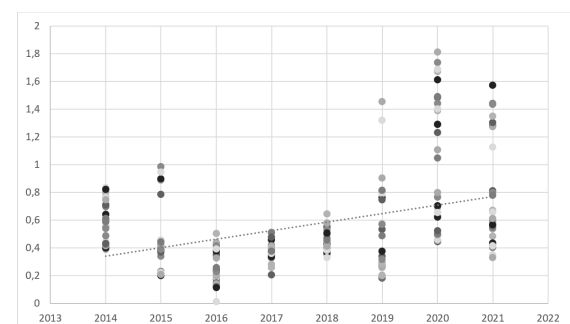
Tabel 7. *Tax Effort* di 27 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat (2014 - 2021)

Tahun	Min	Median	Mean	Max
2014	0,39	0,56	0,59	0,84
2015	0,20	0,39	0,44	0,99
2016	0,01	0,23	0,26	0,50
2017	0,21	0,37	0,38	0,51
2018	0,33	0,43	0,46	0,65
2019	0,18	0,32	0,49	1,46
2020	0,45	1,11	1,05	1,81
2021	0,33	0,60	0,78	1,57

Sumber: data diolah penulis

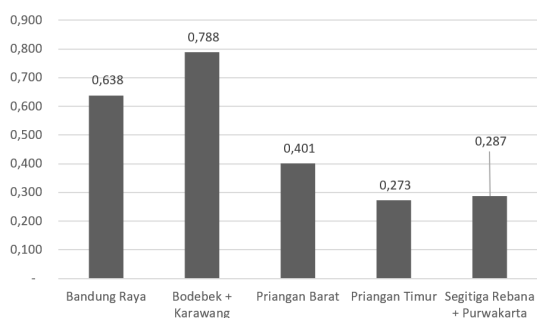
Berdasarkan tabel 7 dapat diketahui bahwa indeks *tax effort* secara rata – rata masih sangat berfluktuatif dari tahun 2014 – 2021, indeks terendah secara rata – rata tercatat didapatkan pada tahun 2016 dengan nilai 0,26, sedangkan tertinggi pada tahun 2020 dengan 1,05. Peningkatan pada tahun 2020 diasumsikan karena terdapat wabah Corona Virus Disease yang mengkontraksi tingkat PDRB, sehingga menimbulkan anomali dalam perhitungan *tax effort*

Tetapi secara agregat, rata – rata *tax effort* ke 27 Pemda mengalami peningkatan dari tahun 2014 – 2021 sebesar 14%, walaupun pada tahun 2016, 2017 & 2018 sebagaimana tertera dalam Grafik 3.1 hampir semua Pemda memiliki *tax effort* dibawah garis tren peningkatan 8 tahun.



Sumber: data diolah penulis

Gambar 3. Rata - Rata Indeks *Tax Effort* Berdasarkan Kluster



Sumber: data diolah penulis

Kami pun melakukan pengklusteran terhadap daerah yang memiliki karakteristik ekonomi yang sama, menjadi 5 kluster besar, yaitu Bandung Raya (Kota Bandung, Kab. Bandung, Kab. Bandung Barat & Kota Cimahi), Bodebek + Karawang (Kab. Bogor, Kota Bogor, Kota Depok Kab. Bekasi, Kota Bekasi & Kab. Karawang), Priangan Barat (Kab. Cianjur, Kab. Sukabumi & Kota Sukabumi), Priangan Timur (Kab. Ciamis, Kab. Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Kota Banjar & Kab. Pangandaran) serta Segitiga Rebana + Purwakarta (Kab. Subang, Kab. Indramayu, Kab. Cirebon, Kota Cirebon, Kab. Majalengka & Kab. Kuningan)

Dari data pengklusteran sebagaimana tertera pada Tabel 7, didapatkan bahwa Kluster Bodebek+Karawang memiliki rata-rata *tax effort* tertinggi selama jangka waktu 8 tahun yaitu sebesar 0,788, serta pada tahun 2020 & 2021 menjadi kluster dengan indeks tertinggi yaitu 1,47 & 1,29 dengan peningkatan sebesar 186% pada tahun 2021 jika dibandingkan dengan tahun 2014. Kami memasukan Kab. Karawang kedalam kluster ini karena dinilai memiliki karakteristik yang mirip dengan Kab/Kota yang masuk dalam kategori Kluster Bodebek.

Kluster ini berperan sebagai daerah penyangga Ibu Kota yang memvalidasi teori aglomerasi ekonomi & efek limpahan (*spillover*) di mana daerah yang dekat dengan kutub pertumbuhan aktivitas ekonomi akan memperoleh manfaat (Kristiaji *dkk.*, 2021). Karakteristik

perekonomian pada kluster ini di dominasi oleh industri sektor pengolahan/manufaktur yang berkontribusi lebih dari 70% dari PDRB. Banyaknya industri pengolahan di kluster ini dicerminkan dengan besaran investasi PMA & PMDN yang diterima mencapai 616 Triliun pada jangka waktu yang sama, hal ini tentunya menggerakkan roda perekonomian & menciptakan *multiplier effect* yang sangat besar seperti mendatangkan tenaga kerja yang sangat banyak, ditambah dengan total populasi yang sudah melebihi 10 juta penduduk. Tentunya hal tersebut menjadi proksi untuk pajak daerah seperti PBB, BPHTB, & PAT, belum lagi dengan perputaran ekonomi yang besar bisa menjadi penggerak untuk pajak daerah konsumsi seperti Pajak Hotel, Restoran & Hiburan.

Kluster dengan indeks *tax effort* tertinggi kedua adalah Kluster Bandung Raya dengan besaran selama jangka waktu 8 tahun yaitu 0,638 & mengalami peningkatan tahun sebesar 124% pada tahun 2021 jika dibandingkan dengan tahun 2014. Hal yang menarik adalah total PDRB kluster Bandung Raya selama 8 tahun terakhir hamper setengahnya dari kluster Bodebek, tetapi masih bisa mempertahankan indeks *tax effort* hanya 0,15 poin dibawah kluster Bodebek + Karawang. Hal ini mencerminkan keberhasilan Pemda dalam mempertahankan efektivitas pemungutan pajak daerah. Jika dilihat dari karakteristik ekonominya, Kota Bandung sebagai Ibu Kota Provinsi di dominasi oleh sektor perdagangan eceran & perdagangan besar, sedangkan Kab. Bandung, Kab. Bandung Barat & Kota Cimahi perekonomiannya di dominasi oleh sektor industri pengolahan/*Manufacturing* yang dicerminkan dengan beberapa daerah industri seperti daerah Rancaekek, Cileunyi, & Cimareme.

Selanjutnya Kluster Priangan Barat yang terdiri dari Kab. Cianjur, Kab. Sukabumi & Kota Sukabumi berada di

peringkat ketiga dengan total nilai indeks *tax effort* sebesar 0,401 dengan penurunan hanya sebesar 1% pada tahun 2021 jika dibandingkan dengan tahun 2014, temuan tersebut menggambarkan nilai yang stagnan & cenderung menurun. Jika mengulik lebih lanjut, karakteristik ekonomi dari Kab. Cianjur & Kab. Sukabumi di dominasi oleh sektor pertanian, yang dikenal susah untuk dikenakan pajak (Gupta, 2007; Topal, 2021) Sedangkan Kota Sukabumi yang menjadi satu – satunya Pemda dengan bentuk administrative kota, sektor ekonominya di dominasi oleh sektor perdagangan eceran/besar.

Kluster Segitiga Rebana + Purwakarta secara mengejutkan berada di peringkat 4 dalam kategori kluster dengan indeks *tax effort* sebesar 0,287 & mengalami penurunan sebesar 10% pada tahun 2021 jika dibandingkan dengan tahun 2014. Kami memasukan Kab. Purwakarta kedalam kluster ini karena dinilai memiliki karakteristik ekonomi yang mirip dengan Kab/Kota yang sudah dikategorikan kedalam kluster ini (Padahal kluster ini merupakan KEK (Kawasan Ekonomi Khusus) yang juga menjadi primadona investasi di Provinsi Jawa Barat dengan beberapa proyek strategis nasional seperti Bandara Internasional Kertajati, Pelabuhan Patimban, Tol Cisumdawu, juga beririsan dengan Tol Trans-Jawa. Jika dilihat dari besaran investasi yang masuk pun berada di angka 127 Triliun dalam jangka waktu 2014 – 2021, lebih besar 46 triliun dibandingkan PMA & PMDN yang diterima Pemda kluster Bandung Raya. Sayangnya investasi yang besar tersebut belum bisa membuahkan hasil yang instan, terutama dalam hal peningkatan penerimaan pajak daerah, belum lagi pemerataan investasi diantara Pemda yang masih kurang, contohnya seperti Kab. Kuningan yang dalam jangka waktu 8 tahun hanya menerima PMA & PMDN sebesar 410 Miliar, jauh dibandingkan dengan Pemda lain dalam kluster ini seperti Kab. Cirebon

yang menerima PMA & PMDN sebesar 26 Triliun, Kab. Subang 14 Triliun, atau bahkan Kab. Purwakarta 52 Triliun. Kami beranggapan hal tersebut sedikit banyak berdampak kepada data BPS yang menyebutkan Kab. Kuningan sebagai daerah dengan penduduk miskin terbanyak di Provinsi Jawa Barat yaitu 12,76% per tahun 2022.

Kategori terakhir adalah kluster Priangan Timur memiliki total indeks *tax effort* sebesar 0,273 dengan penurunan 32% pada tahun 2021 jika dibandingkan dengan tahun 2014. Perdagangan eceran & besar serta sektor pertanian menjadi sektor ekonomi yang paling dominan dalam kluster ini, tetapi keduanya kurang bisa mendorong tingkat perekonomian yang lebih besar seperti daerah lain. Investasi yang masuk selama 8 tahun pun hanya sebesar 5 triliun, sangat jauh jika dibandingkan dengan kluster terdekat yaitu Priangan Barat sebesar 27 triliun, & data BPS menunjukkan Kota Tasikmalaya yang menyandang predikat Pemda dengan penduduk miskin kedua terbanyak se Provinsi Jawa Barat (BPS, 2022). Kami beranggapan bahwa sektor pariwisata yang seharusnya lebih dikembangkan untuk mendongkrak tingkat perekonomian, karena di dalam kluster ini terdapat Kab. Pangandaran yang menjadi salahsatu pantai terbaik di Jawa Barat, belum lagi destinasi wisata religi & alamlainya yang bisa ditawarkan oleh Pemda dalam kluster ini.

Jika dilihat secara garis besar pun, Kabupaten/Kota yang masuk dalam kluster Bodebek + Karawang mendominasi 5 Pemda dengan *tax effort* paling besar di Provinsi Jawa Barat, Kota Bekasi, Depok & Bogor yang memiliki indeks *tax effort* lebih dari 1 dinilai memiliki posisi fiskal & kemandirian keuangan yang kuat (Kristiaji dkk, 2021) artinya Pemda berhasil memiliki ruang fiskal yang lebih leluasa untuk melakukan pembangunan. Hal ini menggambarkan bahwa tata Kelola pajak di daerah tersebut sudah optimal, selain fakta

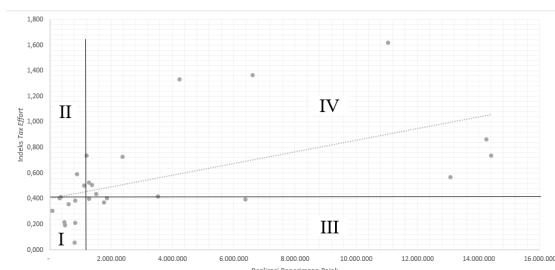
bahwa wilayah perkotaan merupakan episentrum kegiatan perekonomian, pendidikan, serta kemajuan teknologi.

Sedangkan 5 daerah terendah adalah Kota Banjar, Kab. Ciamis, Kab. Garut & Kab. Tasikmalaya yang semuanya masuk dalam kluster Priangan Timur ditambah Kab. Indramayu dengan indeks *tax effort* terendah. Dua hal yang harus menjadi sorotan utama tentunya bagaimana para *stakeholder* Pemda tersebut berinovasi untuk meningkatkan tingkat perekonomian daerahnya, serta menciptakan tata kelola pajak yang efektif & efisien. Terlebih, jika melihat Kab. Indramayu yang menjadi Pemda terendah sedangkan total PDRB selama 8 tahun lebih dari 1.300 Triliun, bahkan lebih besar dari Kota Bekasi yang menjadi peringkat pertama.

Tabel 8. Kabupaten/Kota dengan Rata – Rata Indeks *Tax Effort* Tertinggi & Terendah

Nama Pemda	Indeks <i>Tax Effort</i>
Kota Bekasi	1,618
Kab. Depok	1,366
Kota Bogor	1,332
Kab. Bogor	0,865
Kota Cirebon	0,738
17 Kabupaten/Kota Lain	
Kota Banjar	0,303
Kab. Ciamis	0,216
Kab. Garut	0,209
Kab. Tasikmalaya	0,192
Kab. Indramayu	0,058

Sumber: data diolah penulis



Sumber: data diolah penulis

Gambar 4 Pola Hubungan *Tax Effort* dengan Penerimaan Pajak Daerah

Setelah melakukan pengelompokan kluster & pemeringkatan, kami membagi Pemda menjadi 4 kuadran berdasarkan hubungan *tax effort* dengan total realisasi penerimaan pajak selama 8 tahun. Median dari *axis* realisasi penerimaan pajak berada di angka 1,2 Triliun sedangkan median dari *axis tax effort* berada pada angka 0,42. Kedua median tersebut membentuk menjadi *threshold* serta membentuk data menjadi 4 kuadran yang terbagi atas Kuadran I (*low tax revenue-low tax effort*); Kuadran II (*low tax revenue-high tax effort*); Kuadran III (*high tax revenue-low tax effort*); & Kuadran IV (*high tax revenue-high tax effort*).

Setelah dikelompokkan, terdapat 9 Pemda yang terkonsentrasi pada kuadran I (*tax effort* < 0,42 & *tax revenue* < 1,2 T). Artinya, baik *tax effort* maupun *local taxing power* di daerah-daerah ini masih cenderung rendah & belum optimal. Ke 9 Pemda tersebut, diantaranya Kota Banjar, Kab. Ciamis, Kab. Garut, Kab. Indramayu, Kab. Kunigan, Kab. Pangandaran, Kab. Sukabumi, Kab. Tasikmalaya & Kab. Majalengka. Dengan banyaknya kabupaten/kota yang berada dalam kuadran I, bisa disimpulkan bahwa reformasi pajak sudah sepatutnya menjadi agenda bagi setiap kepala daerah di Provinsi Jawa Barat.

Pada kuadran II, Pemda cenderung memiliki *tax effort* yang tinggi tetapi tidak dibarengi dengan *tax revenue* yang tinggi (*tax effort* < 0,42 & *tax revenue* > 1,2 T). Pada kuadran ini terdapat 2 Pemda, diantaranya Kota Cimahi & Kota Tasikmalaya. Pemda pada kuadran ini sudah mampu memungut pajak secara efektif, tetapi perlu adanya Tindakan untuk semakin memperluas potensi penerimaan pajak yang akan meningkatkan total penerimaan pajak daerah.

Pada kuadran III (*tax effort* > 0,42 & *tax revenue* < 1,2 T) Pemda belum berhasil memungut pajak secara efektif dari perekonomian yang bergulir, Pemda yang berada di kuadran ini berhasil membukukan

*tax revenue* yang besar, namun besaran tersebut masih kurang jika dibandingkan dengan potensi yang ada. Hal tersebut tercermin dari indeks *tax effort* yang masih rendah. Terdapat 5 Pemda yang berada di kuadran ini, diantaranya Kab. Cianjur, Kab. Purwakarta, Kab. Sukabumi, Kab. Bandung & Kab. Karawang.

Kuadran IV merupakan kebalikan dari kuadran I, Pemda yang berada di kuadran ini dinilai memiliki indeks *tax effort* & *tax revenue* yang tinggi (*tax effort* > 0,42 & *tax revenue* > 1,2 T). Terdapat 11 Pemda yang berada dalam kuadran ini, diantaranya Kab. Cirebon, Kab. Subang, Kab. Sumedang, Kab. Bandung Barat, Kota Bogor, Kota Depok, Kab. Bekasi, Kota Bandung, Kab. Bogor & Kota Bekasi. Jika dilihat berdasarkan kuadran ini, dapat diambil kesimpulan bahwa mayoritas Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat telah berhasil mendapatkan *tax ratio* yang tinggi & memiliki kapasitas fiskal yang cukup leluasa. Namun yang masih harus diperhatikan adalah terdapat disparitas yang tinggi antara Pemda yang berada pada kuadran IV dengan kuadran lainnya, bagaimana Pemda yang masuk daerah Bodebek memiliki *tax revenue* & *tax ratio* yang sangat tinggi bila dibandingkan dengan Pemda lainnya. Hal tersebut tentunya berdampak kepada semakin besarnya ketimpangan ekonomi & pembangunan antara Pemda–Pemda tersebut dengan Pemda lainnya di Provinsi Jawa Barat.

Penelitian ini mengkaji *tax effort* di tingkat pemerintah kabupaten/kota dengan fokus pada Provinsi Jawa Barat. Meskipun terdapat penelitian sebelumnya tentang *tax effort* di tingkat nasional atau regional, namun penelitian yang secara khusus mengamati *tax effort* di tingkat kabupaten/kota, terutama pada Provinsi Jawa Barat, masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan kontribusi baru dalam pemahaman tentang faktor-faktor yang memengaruhi *tax effort* di tingkat provinsi.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap teori *tax effort* dalam beberapa aspek. Pertama, penelitian ini menguji hubungan antara *tax effort* dengan variabel-variabel spesifik seperti PDRB per kapita, investasi, tenaga kerja, inflasi, sektor pertanian, & belanja pemerintah fungsi ekonomi. Terutama belanja pemerintah fungsi ekonomi yang belum pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya. Temuan bahwa PDRB per kapita tidak berpengaruh terhadap *tax effort*, sementara investasi & tenaga kerja berpengaruh positif, serta inflasi, sektor pertanian, & belanja fungsi ekonomi berpengaruh negatif, memberikan pemahaman baru tentang faktor-faktor yang memengaruhi tingkat *tax effort*.

Penelitian ini juga diharapkan memberikan wawasan tentang hubungan antara *tax effort* & faktor-faktor ekonomi & kebijakan yang relevan di Provinsi Jawa Barat. Dalam konteks ini, penelitian ini dapat memperluas pemahaman kita tentang mekanisme & dinamika *tax effort* di tingkat provinsi, khususnya di Provinsi Jawa Barat serta dapat menjadi referensi bagi pemerintah daerah & lembaga terkait dalam merancang kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan *tax effort*.

## SIMPULAN

Mayoritas Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat masih bergantung kepada dana transfer Pemerintah Pusat & tergolong kedalam Pemda yang tidak mandiri, hal tersebut terjadi karena pendapatan pajak yang belum memenuhi kebutuhan belanja.

Berdasarkan hasil penelitian, variabel PDRB per kapita dinyatakan tidak berpengaruh terhadap *tax effort*, hal tersebut membuktikan bahwa meningkatnya tingkat perekonomian & kemampuan ekonomis suatu masyarakat tidak serta merta akan mendorong kinerja Perpajakan secara langsung, banyak faktor & isu lain yang menjadi penghambat seperti



kepatuhan wajib pajak, efektivitas pemungut pajak, dll. Variabel inflasi, kontribusi sektor pertanian dalam PDRB serta Belanja Fungsi Ekonomi menunjukkan pengaruh negatif signifikan terhadap *tax effort*, hal tersebut tercermin pada hasil pengklusteran yang menunjukkan daerah yang karakteristik ekonomi di dominasi oleh sektor pertanian seperti daerah Kota Banjar, Kab. Ciamis, Kab. Garut & Kab. Tasikmalaya memiliki indeks *tax effort* yang sangat rendah

Sedangkan variabel investasi (PMA & PMDN) serta tenaga kerja berpengaruh positif & signifikan terhadap *tax effort*, hal tersebut juga tercermin dalam hasil pemeringkatan *tax effort*, dimana Pemda yang mayoritas perekonomian di dominasi oleh sektor manufaktur/pengolahan ditambah dengan posisi dekat dengan episentrum perekonomian seperti Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Bogor & Kabupaten Bogor memiliki indeks *tax effort* paling tinggi se Provinsi Jawa Barat. Sektor manufaktur/pengolahan di daerah tersebut didorong karena tinggi nya nilai PMA & PMDN yang masuk, sehingga menciptakan lapangan kerja yang masif yang menjadi basis pajak daerah yang lebih besar dibandingkan dengan daerah yang karakteristik ekonominya di dominasi sektor lain. Tetapi tentunya investasi yang masuk tersebut harus dibarengi dengan tata kelola perpajakan yang efektif & perencanaan investasi yang matang, karena hasil pengklusteran menunjukkan Pemda yang masuk kedalam kluster Segitiga Rebana mendapatkan investasi yang besar, tetapi belum bisa memaksimalkan pemungutan pajaknya secara keseluruhan. Sehingga di satu sisi para *stakeholder* harus lebih bisa untuk berinovasi & “memasarkan” Pemdanya untuk menarik lebih banyak investasi masuk untuk menggerakkan roda perekonomian serta memperluas potensi pajak, tetapi di sisi lain harus mampu menciptakan administrasi perpajakan yang efektif & efisien. Hasil

dari *benchmarking tax effort* ini juga menjadi acuan seberapa besar *local taxing power* dari masing – masing Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat.

Hasil pemeringkatan berdasarkan kuadran didapatkan bahwa 11 Pemda sudah berada di kuadran IV yang artinya sudah cukup efektif dalam memungut pajak dari perekonomian yang bergulir & memiliki kapasitas fiskal yang cukup leluasa. Tetapi masih terjadi disparitas yang sangat tinggi antara Pemda yang berada di kuadran IV dengan kuadran lainnya, hal tersebut menggambarkan ketimpangan baik ekonomi ataupun sisi administrasi pemungutan pajak di antara daerah tersebut.

Pada daerah-daerah yang telah memiliki *tax effort* tinggi (kuadran I & III), pilihan kebijakan seperti halnya ekstensifikasi basis pajak dapat dipertimbangkan oleh pemerintah. Artinya, jika terbuka opsi adanya *tax revenue assignment* yang lebih luas bagi daerah, sepatutnya diprioritaskan bagi daerah-daerah tersebut. Alasannya, *tax effort* yang dilakukan sudah optimal & cenderung ‘jenuh’. Sedangkan, bagi daerah dengan *tax effort* (kuadran II dan IV), perluasan basis pajak harusnya bukan menjadi opsi utama, melainkan upaya pembenahan pajak daerah khususnya dari sisi administrasi.

Beberapa poin yang menjadi limitasi dalam penelitian ini adalah kami menggunakan data data sekunder, dimana meskipun data tersebut telah diakui keandalannya, tetapi masih mungkin terdapat kesalahan pengolahan data oleh pihak eksternal atau variabel yang tidak terukur dalam data sekunder tersebut. Metode pengolahan data yang digunakan pun hanya menggunakan metode analisis regresi panel untuk mengukur pengaruh variabel-variabel yang diteliti terhadap *tax effort*. Penggunaan metode pengukuran yang lebih seperti *stochastic frontier analysis (SFA)* ataupun *SYS-GMM* yang mungkin dapat memberikan hasil lebih akurat. Ruang lingkup penelitian ini pun

yang terbatas hanya di Kabupaten/Kota yang berada di Provinsi Jawa Barat, sehingga ada kemungkinan bahwa hasil penelitian ini tidak dapat digeneralisasi untuk wilayah lain di Indonesia atau bahkan di luar Indonesia. Serta dalam penelitian ini hanya mempertimbangkan faktor-faktor ekonomi yang berpengaruh terhadap *tax effort*. Faktor-faktor non-ekonomi seperti faktor politik atau sosial yang dapat mempengaruhi *tax effort* tidak dimasukkan dalam penelitian ini. Untuk kesempurnaan dan pengembangan teori *tax effort*, penelitian selanjutnya dapat memperhatikan limit atas penelitian ini agar dapat melaksanakan penelitian berkaitan dengan *tax effort* yang lebih baik.

## REFERENSI

- Bachtiar, A. (2022). Analisis Perhitungan Potensi Pajak Daerah Kabupaten/Kota Dengan Metode Stochastic Frontier Analysis (SFA). *Jurnal Anggaran Dan Keuangan Negara Indonesia*, 4(2), 128–142.
- Bahl, R. W. (1971). A Regression Approach to Tax Effort and Tax Ratio Analysis. *International Monetary Fund*, 570–612.
- Bird, R. M., Martinez-Vazquez, J., & Torgler, B. (2008). Tax Effort in Developing Countries and High Income Countries: The Impact of Corruption, Voice and Accountability. *Economic Analysis and Policy*, 38(1), 55–71. [https://doi.org/10.1016/S0313-5926\(08\)50006-3](https://doi.org/10.1016/S0313-5926(08)50006-3)
- Castañeda Rodríguez, V. M. (2018). Tax determinants revisited. An unbalanced data panel analysis. *Journal of Applied Economics*, 21(1), 1–24. <https://doi.org/10.1080/15140326.2018.1526867>
- Crivelli, E., & Gupta, S. (2014). Resource blessing, revenue curse? Domestic revenue effort in resource-rich countries. *European Journal of Political Economy*, 35, 88–101. <https://doi.org/10.1016/j.ejpoleco.2014.04.001>
- Dalamagas, B., Palaios, P., & Tantos, S. (2019). A new approach to measuring tax effort. *Economies*, 7(3), 1–25. <https://doi.org/10.3390/economies7030077>
- Ebel, R., & Taliercio, R. (2005). Subnational tax policy and administration in developing economies. In *Tax Notes International* (Vol. 37, Issue 1).
- Fenochietto, R., & Pessino, C. (2013). Understanding Countries' Tax Effort. *IMF Working Papers*, 13(244), 1. <https://doi.org/10.5089/9781484301272.001>
- Gupta, A. Sen. (2007). Determinants of Tax Revenue Efforts in Developing Countries. *IMF Working Papers*, 07(184), 1. <https://doi.org/10.5089/9781451867480.001>
- Kristiaji, B., Vissaro, D., & Ayumi, L. (2021). *Mempertimbangkan Reformasi Pajak Daerah berdasarkan Analisis Subnational Tax Effort* (Issue September).
- Le, T. M., Moreno-dodson, B., & Bayraktar, N. (2012). Tax Capacity and Tax Effort: Extended Cross-Country Analysis from 1994 to 2009. In *World Bank* (Issue tax capacity, tax effort).
- Mahdavi, S. (2008). The level and composition of tax revenue in developing countries: Evidence from unbalanced panel data. *International Review of Economics and Finance*, 17(4), 607–617. <https://doi.org/10.1016/j.iref.2008.01.001>
- Mahmood, H., & Chaudhary, A. R. (2013).





- Impact of FDI on tax revenue in Pakistan. *Pakistan Journal of Commerce and Social Sciences*, 7(1), 59–69.
- Mawejje, Joseph., & Sebudde, R. K. (2019). Tax revenue potential and effort: Worldwide estimates using a new dataset. *Economic Analysis and Policy*, 63, 119–129. <https://doi.org/10.1016/j.eap.2019.05.005>
- Postali, F. A. S. (2015). Tax effort and oil royalties in the Brazilian municipalities. *Economia*, 16(3), 395–405. <https://doi.org/10.1016/j.econ.2015.08.001>
- Prawoto, B. (2017). *Analisis Regresi Dalam Penelitian Ekonomi & Bisnis*. Rajawali Pers.
- Topal, M. H. (2021). *Does Quality of Governance Affect Tax Effort in Sub-Saharan Africa?* 6(2), 414–434.
- Xing, W., & Zhang, Q. (2018). The effects of vertical and horizontal incentives on local tax efforts: evidence from China. *Applied Economics*, 50(11), 1222–1237. <https://doi.org/10.1080/00036846.2017.1355546>
- Zárate-Marco, A., & Vallés-Giménez, J. (2019). Regional tax effort in Spain. *Economics*, 13, 1–32. <https://doi.org/10.5018/economics-ejournal.ja.2019-31>

